



REPUBLIK INDONESIA

**POKOK-POKOK KETERANGAN PEMERINTAH MENGENAI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sehat dan Salam Sejahtera,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan*

**Yang kami hormati,
Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Serta hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat kesehatan, waktu dan kemudahan kepada kita, untuk hadir dalam Sidang Paripurna DPR RI dengan agenda **“Penyampaian Pokok–Pokok Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang–Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021”**, atau selanjutnya dapat kita sebut RUU P2 APBN.

Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RUU P2 APBN disampaikan Pemerintah kepada DPR dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. BPK memberikan penilaian terbaik atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2021, yaitu **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Opini WTP)**

atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, atas semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada kesempatan ini, **kami ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh komponen bangsa yang telah bersama-sama melaksanakan APBN TA 2021**. Rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada DPR dan BPK yang telah banyak memberikan masukan dan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan tata kelola dan sistem pemerintahan, kemarin dan di masa yang akan datang.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Sebelum menjelaskan Pokok–Pokok Keterangan Pemerintah mengenai RUU P2 APBN TA 2021, **izinkan kami mengingatkan kembali pelaksanaan APBN sepanjang tahun 2021. Memasuki tahun 2021, Pemerintah memiliki optimisme** bahwa perekonomian Indonesia akan semakin baik, seiring dengan tren pemulihan yang berlanjut sejak kuartal ke-3 tahun 2020 dan dimulainya program vaksinasi di awal tahun 2021. **Namun demikian, Pemerintah tetap waspada** dengan ancaman dan ketidakpastian yang disebabkan oleh Covid-19. Untuk itu, **Pemerintah melanjutkan kebijakan APBN yang fleksibel dan responsif selama tahun 2021**.

APBN TA 2021 masih harus bekerja keras khususnya dalam menangani gelombang **varian Delta** yang muncul pada akhir Juni hingga Agustus 2021. Pada saat terjadi lonjakan kasus yang ekstrem, Pemerintah menerapkan kebijakan PPKM Darurat di sebagian besar wilayah NKRI. Untuk merespons dan mengantisipasi dampak varian Delta tersebut, **Pemerintah menaikkan alokasi Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) menjadi Rp744,8 triliun atau meningkat 7,1 persen dibanding Tahun 2020 Rp695,2 triliun**. Peningkatan alokasi ini merupakan bagian dari respon APBN untuk mengurangi tekanan yang terjadi pada masyarakat dan dunia usaha. Anggaran kesehatan ditingkatkan untuk menangani dampak pada sektor kesehatan yang cukup berat. Selain itu, belanja perlindungan sosial juga diperluas dan diperpanjang periode penyalurannya untuk menjangkau masyarakat paling rentan agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Pemerintah juga memberikan stimulus fiskal bagi dunia usaha sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dengan berbagai upaya tersebut, ekonomi Indonesia tahun 2021 dapat tumbuh 3,69 persen. Sebuah capaian yang sangat baik di tengah situasi yang

penuh tantangan. **Level PDB riil tahun 2021 bahkan sudah melebihi level masa pra-pandemi di tahun 2019 (101,6 persen)** di saat banyak negara di dunia belum kembali pada level pra-pandemi, seperti Perancis (98,4 persen), Jerman (97,5 persen), Inggris (96,4 persen), Malaysia (96,4 persen), dan Filipina (95,5 persen).

Pemulihan ekonomi Indonesia tahun 2021 juga terjadi secara inklusif, **hal ini tercermin dari berbagai indikator kesejahteraan, yaitu:**

- Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 7,07 persen menjadi 6,49 persen
- Tingkat ketimpangan (rasio gini) menurun dari 0,385 menjadi 0,381
- Angka kemiskinan menurun dari 10,19 persen menjadi 9,71 persen
- Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 71,94 menjadi 72,29.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021. **Dokumen RUU ini disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).** RUU P2 APBN TA 2021 diajukan dalam rangka memenuhi ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, **LKPP Tahun 2021 terdiri atas tujuh komponen laporan, yaitu:** (1) Laporan Realisasi APBN, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan, yang disertai dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya. Seluruh kinerja keuangan negara selama tahun 2021, tercermin dalam LKPP Tahun 2021. Ringkasan dari masing-masing laporan tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Dalam Laporan Realisasi APBN dijelaskan bahwa **Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp2.011,3 triliun yang terdiri dari** Penerimaan Perpajakan sebesar **Rp1.547,8 triliun**, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp458.5 triliun**, dan Penerimaan Hibah sebesar **Rp5,0 triliun**. Realisasi Pendapatan

Negara tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2021, yaitu **115,35 persen atau tumbuh 22,06 persen dibandingkan realisasi tahun 2020**. Realisasi Penerimaan Perpajakan tahun 2021 yang mencapai Rp1.547,8 triliun tersebut atau 107,15 persen dari target APBN TA 2021, **telah kembali pada level pra-pandemi pada tahun 2019** yaitu Rp1.546,1 triliun.

Pada TA 2021, **Realisasi Belanja Negara mencapai Rp2.786,4 triliun atau 101,32 persen dari APBN TA 2021**. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari **Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.000,7 triliun** serta **Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp785,7 triliun**.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan realisasi Belanja Negara, terdapat **Defisit Anggaran sebesar Rp775,1 triliun**. Realisasi defisit anggaran Tahun 2021 masih terkendali pada level 4,57 persen terhadap PDB. Angka defisit ini lebih rendah dari target APBN sebesar 5,70 persen.

Realisasi pembiayaan neto TA 2021 Rp871,7 triliun atau 86,62 persen dari target APBN Rp1.006,4 triliun. Pembiayaan tersebut terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri **Rp881,6 triliun** dan Pembiayaan Luar Negeri minus **Rp9,9 triliun**. Pembiayaan tahun 2021 difokuskan untuk menutup defisit dan dimanfaatkan untuk investasi Pemerintah pada BUMN dan BLU terutama untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM.

Dengan defisit yang lebih rendah, sebagai akibat membaiknya pendapatan negara dan optimalisasi pembiayaan anggaran, terdapat **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 sebesar Rp96,6 triliun**. SiLPA tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah yang tertunda, agar kesinambungan fiskal APBN ke depan semakin baik dalam mendukung konsolidasi fiskal pada tahun 2023.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dijelaskan bahwa **SAL awal TA 2021 sebesar Rp388,1 triliun**. Setelah memperhitungkan penggunaan SAL Rp143,9 triliun, SiLPA dan penyesuaian SAL, **maka SAL akhir Tahun 2021 adalah sebesar Rp337,7 triliun**.

Posisi keuangan Pemerintah ditunjukkan dalam **Neraca per 31 Desember 2021**, yang terdiri dari **Aset Rp11.454,6 triliun, Kewajiban Rp7.538,3 triliun**, dan

Ekuitas Rp3.916,3 triliun. Terdapat peningkatan kewajiban Pemerintah pada Tahun 2021 yang sebagian besar berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara, yang digunakan terutama untuk mendanai pelaksanaan Program PC-PEN dan kegiatan prioritas lainnya, termasuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam Laporan Operasional (LO) Tahun 2021 disampaikan bahwa Pendapatan Operasional Rp2.234,2 triliun dan Beban Operasional Rp2.957,4 triliun, yang membentuk Defisit dari Kegiatan Operasional Rp723,2 triliun. Di samping itu, **terdapat Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp65,9 triliun,** sehingga **membentuk Defisit Laporan Operasional Tahun 2021 Rp657,2 triliun.**

Laporan Arus Kas Tahun 2021 memberikan informasi mengenai arus penerimaan dan pengeluaran kas negara selama tahun 2021. **Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp535,9 triliun, dari Aktivitas Investasi minus Rp383,8 triliun, dan dari Aktivitas Pendanaan Rp1.016,4 triliun,** serta dari **Aktivitas Transitoris Rp39,3 triliun.** Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi yang bernilai negatif mencerminkan adanya upaya Pemerintah untuk melakukan investasi terutama untuk mendukung berbagai proyek pembangunan infrastruktur.

Dalam Laporan Perubahan Ekuitas dapat kami sampaikan bahwa Ekuitas Awal Tahun 2021 Rp4.473,2 triliun. Setelah memperhitungkan Defisit Laporan Operasional Rp657,2 triliun, Penyesuaian yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas Rp100,0 triliun, dan Transaksi Antar Entitas Rp0,3 triliun, **maka Ekuitas Akhir Tahun 2021 adalah Rp3.916,3 triliun.**

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Sesuai amanat Perppu 1 Tahun 2020, Realisasi Program PC-PEN TA 2021 juga dilaporkan secara komprehensif dalam LKPP Tahun 2021. **Program PC-PEN TA 2021 dikelompokkan dalam lima klaster** yaitu: (1) klaster Kesehatan, (2) klaster Perlindungan Sosial, (3) klaster Program Prioritas, (4) klaster Dukungan UMKM dan Korporasi, dan (5) klaster Insentif Usaha.

Realisasi program PC-PEN Tahun 2021 mencapai Rp655,1 triliun, atau 87,96 persen dari alokasi Rp744,8 triliun. Dari lima klaster Program PC-PEN tersebut, realisasi terbesar terdapat pada Klaster Kesehatan Rp198,1 triliun, yang diikuti dengan Klaster Perlindungan Sosial Rp167,7 triliun dan Klaster Dukungan

UMKM dan Korporasi Rp116,2 triliun. Selanjutnya, Klaster Program Prioritas dan Klaster Insentif Usaha dengan realisasi masing-masing sebesar Rp105,6 triliun dan Rp67,6 triliun.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun 2021, **terdapat 27 temuan pemeriksaan yang tidak mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.** Meskipun demikian, Pemerintah tetap berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi BPK atas temuan tersebut, sehingga pengelolaan keuangan negara akan menjadi semakin berkualitas di masa mendatang. **Tindak lanjut yang akan dilakukan Pemerintah, antara lain:**

1. **Berkaitan dengan temuan penentuan kriteria Program PC-PEN Tahun 2021 dan pelaporannya pada LKPP Tahun 2021, Pemerintah akan** menetapkan kriteria/program yang menjadi bagian dari Program PC-PEN dan mengoptimalkan implementasi mekanisme pelaporan program PC-PEN dalam laporan keuangan.
2. **Terkait dengan temuan pengelolaan insentif dan fasilitas perpajakan Tahun 2021, Pemerintah akan** memutakhirkan sistem pengajuan insentif Wajib Pajak dan menetapkan pedoman pelaporan realisasi insentif dan fasilitas perpajakan.
3. **Untuk menindaklanjuti temuan kebijakan akuntansi yang belum mengatur pelaporan secara akrual atas transaksi pajak atas penyajian hak dan kewajiban negara, Pemerintah telah** menugaskan Tim *Task Force* untuk berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dalam percepatan penyelesaian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) terkait, untuk selanjutnya menyempurnakan kebijakan akuntansi terkait transaksi perpajakan SAP.
4. **Berkenaan dengan temuan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja Pemerintah, Pemerintah akan** meningkatkan kapasitas SDM pengelola keuangan, meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, serta meningkatkan peran APIP dalam memitigasi risiko ketidakpatuhan, ketidaktercapaian output, ketidaktepatan sasaran dan penyimpangan dalam pelaksanaan anggaran.
5. **Terkait dengan temuan sisa dana Investasi Pemerintah dalam rangka**

program Pemulihan Ekonomi Nasional (IPPEN) pada PT Garuda Indonesia dan PT Krakatau Steel, Pemerintah telah mengembalikan sisa dana IPPEN PT Garuda Indonesia sebesar Rp7,50 triliun ke kas negara, **dan melakukan evaluasi** atas *corrective action plan* PT Krakatau Steel dalam rangka memenuhi *Key Achievement Indicator (KAI)* **dan mengembalikan sisa Dana IPPEN jika** hasil evaluasi menunjukkan PT Krakatau Steel tidak dapat memenuhi KAI.

6. **Untuk temuan piutang pajak macet yang belum dilakukan tindakan penagihan yang memadai, Pemerintah akan** melakukan inventarisasi atas piutang macet yang belum daluwarsa penagihan sampai dengan Juni 2022 dan mengembangkan sistem informasi dan monitoring ketetapan pajak yang akan daluwarsa penagihan.
7. **Berkaitan dengan temuan perlakuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)** sebagai investasi jangka panjang nonpermanen lainnya yang belum didukung keselarasan regulasi, kejelasan skema, dan penyajian dalam LK BP Tapera, **Pemerintah akan** menyelaraskan ketentuan mengenai Dana Tapera pada PP Nomor 25 Tahun 2020 dengan ketentuan dalam UU APBN serta menyusun kebijakan akuntansi terkait pengelolaan Dana FLPP ini.
8. **Berkenaan dengan temuan belum disajikannya kewajiban jangka panjang atas program pensiun pada Neraca, Pemerintah telah** memerintahkan Tim *Task Force* untuk berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan untuk segera memfinalisasi dan menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Imbalan Kerja.
9. **Untuk temuan kelemahan penatausahaan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), Pemerintah akan** melakukan identifikasi upaya hukum lain yang masih mungkin dilakukan sebagai bentuk pemantauan atas putusan hukum *inkracht*. Sedangkan, untuk pengalokasian anggaran pembayaran kewajiban dari putusan hukum *inkracht*, Pemerintah akan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Demikianlah Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021. RUU ini diajukan Pemerintah kepada DPR RI untuk dibahas dan selanjutnya dimintakan persetujuan

untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang. Sekali lagi, kita semua pantas bersyukur kepada Allah SWT yang telah membimbing kita semua melalui masa-masa sulit yang luar biasa. Semoga dengan kerja keras dan kebersamaan yang kita miliki, menjadi modal bagi kita untuk terus memberikan upaya maksimal dalam memulihkan perekonomian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati usaha kita, meningkatkan kualitas APBN sebagai instrumen kebijakan guna mencapai cita-cita nasional, mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera.

Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu dan hadirin semua.

**Wallohul Muwafiq ilaa Aqwamit Thoriq
Wassalamu'alaikum warrohmatullahi wabarokatuh,
Om shanti shanti shanti om,
Namo Buddhaya,**

a.n. Pemerintah Republik Indonesia

Menteri Keuangan

Ttd

Sri Mulyani Indrawati